



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

Jalan Sultan Alaidin Mahmudsyah Nomor 10, Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman,
Kota Banda Aceh, Aceh 23242, www.pt-nad.go.id, pt.bandaaceh@gmail.com

Nomor : 521 /KPT.W1-U/OT1.6/II/2026 Banda Aceh, 12 Februari 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Analisa Pengisian Aplikasi Si-MASku
Triwulan IV Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri
Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh

Yth. Ketua Pengadilan Negeri
Di
Tempat

Menindaklanjuti Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh nomor 3032/KPT.W1-U/SK.HM1.1/IX/2024 tentang Pemberlakukan Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (Si-MASku) Versi 2.1, telah dilaksanakan analisa terhadap dokumen yang diunggah pada aplikasi dimaksud untuk periode Triwulan IV Tahun 2025. Terhadap hal tersebut, diimbau kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk :

1. agar melakukan pemantauan capaian kinerja dan upaya-upaya untuk mencapai target kinerja dengan seksama melalui penyampaian berita acara monev capaian kinerja yang akurat, lengkap, dan memiliki penjelasan yang memadai;
2. agar memantau perbaikan terhadap analisa yang dilampirkan pada surat ini sehingga terwujud pelaporan pemantauan dan kinerja yang lebih baik.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.



HASIL MONITORING DAN EVALUASI PENGISIAN APLIKASI SIMASKU
UNTUK PENGADILAN TINGKAT PERTAMA SEWILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PERIODE TRIWULAN IV (OKTOBER - DESEMBER) TAHUN 2025

No	UNIT KERJA	SS Aplikasi Komdanas	Dokumen Rapat	BA Capaian Kinerja	Laporan Hasil Tindak Lanjut	Monev Renaksi	Cetakan Excel data Perkara	
1	PN Banda Aceh	√	Pada notula rapat tidak ada informasi yang menjelaskan analisa keberhasilan untuk indikator yang mencapai target	1. BA Capaian Kinerja belum secara rinci menginformasikan realisasi, capaian dan data perkara selama TW IV 2. BA hanya menginformasikan rekomendasi perbaikan untuk indikator yang gagal mencapai target namun tidak memberikan analisa penyebab keberhasilan untuk indikator yang berhasil mencapai target 3. Tidak menginformasikan berapa jumlah perkara perdata dan perkara pidana yang masuk dan selesai selama triwulan IV; 4. Tidak menginformasikan hal-hal terkait data yang dijadikan dasar dalam mengukur realisasi dan capaian per indikator kinerja dan hanya merangkum jumlah indikator yang berhasil mencapai target dan indikator yang tidak mencapai target 5. Tidak ada informasi terkait berapa salinan putusan yang dikirim serta media yang digunakan, berapa yang dilakukan secara konvensional, berapa yang dilakukan secara elektronik, berapa yang melalui pos 6. Agar memperhatikan periode pengambilan data sesuai dengan IKU. Untuk beberapa indikator sumber data adalah laporan tahunan sehingga seharusnya realisasi dan capaianya tidak dihitung pada TW IV	Terdapat alasan kegagalan yang tidak relevan dengan indikator kinerja sehingga tindaklanjut hasil monev yang dilampirkan tidak berpengaruh terhadap peningkatan kinerja	Masih terdapat perhitungan capaian yang berbeda antara monev rencana aksi dan penginputan pada aplikasi SIMASKU. Terdapat alasan kegagalan yang tidak relevan dengan indikator kinerja		File excel yang dilampirkan tidak menginformasikan data perkara, tidak ada informasi terkait nomor perkara, tanggal perkara masuk dan selesai, tanggal salinan/petikan/amar putusan dikirimkan, pengajuan perkara secara konvensional atau elektronik.
2	PN Sabang	√	Terdapat pembahasan mengenai Indeks Pengelolaan Aset pada dokumen rapat, namun tidak dibahas pada BA Capaian Kinerja	1. BA Capaian kinerja tidak menjelaskan keterangan jumlah keterangan perkara dan putusan; 2. Tidak terdapat perkara yang diajukan secara RJ, namun terdapat sebab kegagalan; 3. Tidak terdapat sebab kegagalan pada indikator perkara yang diselesaikan melalui mediasi namun terdapat rekomendasinya.	Laporan tindaklanjut tidak menyertakan rekomendasi dan hasil tindaklanjut yang telah dilakukan	√	- Perhitungan capaian kinerja pada data excel yang ditampilkan belum mengakomodir seluruh IKU baru - untuk nilai IKPA tahunan, tidak dibagi 4. Ambil nilai Desember di aplikasi OMSPLAN atau Myintress	

			Pada notula rapat tidak ada informasi yang menjelaskan analisa keberhasilan untuk indikator yang mencapai target. Tidak terlihat adanya rekomendasi perbaikan untuk indikator yang tidak berhasil mencapai target dari pimpinan	1. Untuk indikator diversi pada BA monev dijelaskan tidak ada perkara yang selesai dengan diversi dengan hasil capaian 0%, berbeda dengan isi Notula dan pengisian pada aplikasi SIMASKU; 2. Untuk indikator persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu belum menginformasikan berapa salinan putusan yang tersedia dan apakah dikirimkan secara konvensional, pos maupun elektronik 3. Untuk indikator persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tk banding, kasasi dan pk serta indikator persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tk banding, kasasi dan pk belum menginformasikan jumlah pengiriman secara konvensional, pos maupun elektronik 4. Agar memperhatikan periode pengambilan data sesuai dengan IKU. Untuk beberapa indikator sumber data adalah laporan tahunan sehingga seharusnya realisasi dan capaiannya tidak dihitung pada TW IV 5. Nilai capaian untuk indikator IKPA yang diakui dan diinput pada SIMASKU berbeda dengan tangkap layar aplikasi OMSPAN yang terlampir pada file excel	1. Judul tabel adalah LHTL untuk TW IV namun pada tabel disebutkan hasil pengukuran monev dan tindaklanjut TW III 2. Untuk indikator RJ realisasi dan capaian 0% namun tidak ada uraian permasalahan yang dihadapi untuk indikator yang tidak mencapai target juga tidak menjelaskan kendala nyata yang dihadapi dalam aksi/kegiatan yang telah dilakukan	Uraian progres pelaksanaan untuk tiap aksi per indikator kinerja belum menunjukkan progres kerja nyata yang telah dilakukan dalam mencapai target. Uraian permasalahan yang dihadapi untuk indikator yang tidak mencapai target juga tidak menjelaskan kendala nyata yang dihadapi dalam aksi/kegiatan yang telah dilakukan	1. Untuk indikator IKPA nilai realisasi tidak sesuai dengan tangkap layar aplikasi OMSPAN terlampir. Untuk realisasi tahunan tidak perlu dibagi 4, cukup ambil nilai akhir untuk bulan Desember pada OMSPAN 2. Berdasarkan data excel yang terlampir terdapat 5 perkara diversi namun tidak ada data pendukung yang menginformasikan hasil musyawarah diversi 3. Berdasarkan tabel data perkara pada file excel diketahui bahwa tidak ada mediasi pada Triwulan IV namun pada BA Monev dan Monev Rencana Aksi diakui 1 mediasi berhasil
3	PN Sigli	✓					
4	PN Bireuen	✓	1. Nilai realisasi dan capaian yang terdapat pada notula rapat monev berbeda dengan nilai yang diinput pada aplikasi SIMASKU (indikator eksekusi) 2. Berdasarkan isi notula belum terlihat pimpinan menyampaikan hasil dari monev capaian kinerja yang dilakukan apakah ada target yang tidak tercapai, alasan maupun rekomendasi pimpinan untuk perbaikan. 3. Untuk IKU IPASN dan IPA sumber data berdasarkan IKU adalah laporan tahunan sehingga tidak dapat diukur pertriwulan *Catatan : Kesalahan berulang sejak TW I	1. Nilai realisasi dan capaian yang terdapat pada BA Capaian Kinerja berbeda dengan notula monev capaian kinerja; 2. Terdapat target yang tidak tercapai namun tidak ada rekomendasi perbaikan ke depannya; 3. Tidak ada analisa keberhasilan dan kegagalan mencapai target. 4. BA tidak menginformasikan hal-hal terkait data yang dijadikan dasar dalam mengukur realisasi dan capaian per indikator kinerja dan hanya merangkum jumlah indikator yang berhasil mencapai target dan indikator yang tidak mencapai target 5. Tidak ada informasi terkait berapa salinan putusan yang dikirim serta media yang digunakan, berapa yang dilakukan secara konvensional, berapa yang dilakukan secara elektronik, berapa yang melalui pos 6. Agar memperhatikan periode pengambilan data sesuai dengan IKU. Untuk beberapa indikator sumber data adalah laporan tahunan sehingga seharusnya realisasi dan capaiannya tidak dihitung pada TW IV *Catatan berulang karena tidak ada perbaikan sejak TW I	Satker sudah membuat laporan tindak lanjut atas evaluasi kinerja per pegawai namun belum melampirkan laporan tindaklanjut hasil monev capaian kinerja satuan kerja sehingga belum terlihat apakah rekomendasi hasil monev telah dilaksanakan *Catatan berulang karena tidak ada perbaikan sejak TW I	1. Perhitungan capaian dan realisasi pada dokumen monev rencana aksi berbeda dengan yang diinput pada aplikasi SIMASKU, Notula Rapat dan BA Monev Capaian Kinerja. 2. Uraian progres pelaksanaan untuk tiap aksi per indikator kinerja belum menunjukkan progres kerja nyata yang telah dilakukan dalam mencapai target. Uraian permasalahan yang dihadapi untuk indikator yang tidak mencapai target juga tidak menjelaskan kendala nyata yang dihadapi dalam aksi/kegiatan yang telah dilakukan *Catatan berulang karena tidak ada perbaikan sejak TW I	File excel yang dilampirkan belum mengakomodir seluruh perhitungan capaian kinerja berdasarkan IKU terbaru

5	PN Lhoksukon	✓	Tidak melampirkan notulen rapat	<p>1. BA Capaian Kinerja tidak menerangkan secara rinci jumlah perkara yang ditangan; 2. BA Monev Capaian kinerja tidak sepenuhnya menjelaskan analisa keberhasilan/kegagalan yang cukup; 3. Pada Indikator persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan, analisa keberhasilan/kegagalan membahas mengenai perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi; 4. Untuk perkara yang tidak memiliki pengajuan, capaian kinerja seharusnya N/A</p>	<p>Pelaksanaan tindaklanjut yang dilakukan tidak cukup untuk menjadi perbaikan kinerja karena masih belum relevan dengan kinerja yang diharapkan</p>	<p>Monev renaksi belum menampilkan seluruh uraian rencana aksi untuk seluruh indikator</p>	<p>Perhitungan capaian kinerja pada data excel yang ditampilkan belum mengakomodir seluruh IKU baru</p>
6	PN Lhokseumawe	✓	Notulen rapat monev TW 4 sudah ada namun berdasarkan notulen tersebut dalam rapat monev tidak ada menjelaskan secara detil mengenai analisa keberhasilan/ kegagalan serta rekomendasi untuk target kinerja indikator yang tidak tercapai.	<p>1. Terdapat perkara eksekusi Nomor 2/Pdt.Eks/2025/PN Lsm yang diakui berhasil eksekusi, padahal baru dalam tahap aanmaning; 2. Terdapat penyebab kegagalan dan keberhasilan yang tidak relevan dengan capaian. misal untuk perkara mediasi penyebab kegagalan karena hakim berusaha maksimal; 3. Terdapat indikator yang diukur tahunan, namun dijabarkan pada capaian triwulan.</p>	<p>Pelaksanaan tindaklanjut yang dilakukan tidak cukup untuk menjadi perbaikan kinerja karena masih belum relevan dengan kinerja yang diharapkan</p>	<p>Monev renaksi belum menampilkan tindaklanjut atas rekomendasi yang diberikan.</p>	<p>1. Terdapat data yang belum mengakomodir keterangan untuk perhitungan capaian kinerja. Contoh pada sheet Persentase penyediaan/pengiriman Salinan Putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak, tidak terdapat data putusan dikirim/disediakan pengadilan; 2. Untuk perhitungan ketepatwaktuan salinan putusan kasasi yang disampaikan pada pihak, sesuai Perma no 6 Tahun 2022 pasal 34 ayat (7) salinan putusan dan/atau petikan perkara kasasi yang diajukan secara elektronik harus dikirimkan para pihak paling lambat 2 hari kerja, namun sesuai file excel yang diberikan masih ditemukan pemberitahuan melewati 2 hari kerja dan terhitung tepat waktu; 3. Terdapat keterangan eksekusi berhasil 100%, namun pada web perkusi badilum ditemukan baru sampai tahap aanmaning. Pedoman Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 27101 /SEK/ SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 - 2029</p>
7	PN Takengon	✓	<p>1. Pada notula rapat tidak ada informasi yang menjelaskan analisa keberhasilan untuk indikator yang mencapai target 2. Tidak terlihat adanya rekomendasi perbaikan untuk indikator yang tidak berhasil mencapai target dari pimpinan 3. IKU yang dimonev berdasarkan notula rapat dan BA monev berbeda</p>	<p>1. Untuk indikator diversi disebutkan tidak ada perkara anak yang masuk namun ada alasan kegagalan dan rekomendasi 2. Untuk indikator RJ pada SIMASKU dan notula rapat disebutkan capaian melebihi target namun terdapat alasan kegagalan pada BA Monev 3. Untuk indikator eksekusi disebutkan tidak ada permohonan eksekusi yang masuk namun ada alasan kegagalan dan rekomendasi 4. Untuk indikator yang tidak ada pengajuan realisasi dan capaian seharusnya N/A 5. Untuk indikator persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tk banding, kasasi dan pk serta indikator persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tk banding, kasasi dan pk belum menginformasikan jumlah pengiriman secara konvensional, pos maupun elektronik 6. Agar memperhatikan periode pengambilan data sesuai dengan IKU. Untuk beberapa indikator sumber data adalah laporan tahunan sehingga seharusnya realisasi dan capaiannya tidak dihitung pada TW IV</p>	<p>1.Judul tabel adalah LHTL untuk TW IV namun pada tabel disebutkan hasil pengukuran monev TW II dan tindaklanjut TW III 2. Target pelaksanaan tindaklanjut monev tidak spesifik sehingga tidak dapat diukur pelaksanaannya; 3. Satuan kerja agar terlebih dahulu membuat analisa hambatan ataupun langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan pada laporan monev capaian kinerja sebelum dibuat laporan tindak lanjut agar tindaklanjut yang dilaporkan benar-benar berhubungan dengan peningkatan kinerja.</p>	<p>1. IKU pada dokumen monev rencana aksi berbeda dengan IKU pada monev capaian kinerja 2. Target pada monev rencana aksi berbeda dengan target yang diinput pada SIMASKU serta BA rapat monev</p>	<p>1. File excel yang dilampirkan belum mengakomodir seluruh perhitungan capaian kinerja berdasarkan IKU terbaru 2. untuk nilai IKPA tahunan, tidak dibagi 4. Ambil nilai Desember di aplikasi OMSPLAN atau Myintress</p>

8	PN Langsa	√	<p>1. Berdasarkan penginputan pada SIMASKU untuk indikator RJ berhasil mencapai target namun pada notula rapat dinyatakan gagal dan terdapat rekomendasi perbaikan</p> <p>2. Berdasarkan penginputan pada SIMASKU untuk indikator mediasi gagal mencapai target namun tidak ada alasan kegagalan dan rekomendasi perbaikan</p> <p>3. Berdasarkan penginputan pada SIMASKU untuk indikator perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik gagal mencapai target namun tidak ada alasan kegagalan dan rekomendasi perbaikan</p> <p>4. Berdasarkan penginputan pada SIMASKU untuk indikator persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan gagal mencapai target namun tidak ada alasan kegagalan dan rekomendasi perbaikan</p>	<p>1. Tidak menginformasikan berapa jumlah perkara perdata dan perkara pidana yang masuk dan selesai selama triwulan IV</p> <p>2. Untuk indikator persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tk banding, kasasi dan pk serta indikator persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tk banding, kasasi dan pk belum menginformasikan jumlah pengiriman secara konvensional, pos maupun elektronik</p> <p>3. Tidak menjelaskan mengapa perkara yang diputus sebanyak 119 namun yang diinput pada direktori putusan hanya 89</p> <p>4. Terdapat analisa program yang menunjang keberhasilan untuk indikator yang gagal mencapai target</p> <p>5. Tidak ada sebab kegagalan untuk indikator yang gagal mencapai target dan tidak ada rekomendasi perbaikan</p> <p>6. Untuk indikator yang tidak ada pengajuan realisasi dan capaian seharusnya N/A</p>	<p>1. Satuan kerja agar terlebih dahulu membuat analisa hambatan ataupun langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan pada laporan monev capaian kinerja sebelum dibuat laporan tindaklanjut yang dilaporkan benar-benar berhubungan dengan peningkatan kinerja</p> <p>2. Masih terdapat rencana aksi tindaklanjut yang tidak berkaitan dengan kendala yang dihadapi</p> <p>3. Untuk indikator IP ASN dan IPA tidak perlu dijelaskan pada TW IV namun diinput Tahunan karena periode pengambilan data pada indikator tersebut adalah Tahunan</p>	<p>1. Uraian progres pelaksanaan untuk tiap aksi per indikator kinerja belum menunjukkan progres kerja nyata yang telah dilakukan dalam mencapai target</p> <p>2. Masih terdapat tindaklanjut yang tidak berkaitan dengan kendala yang dihadapi</p> <p>3. Untuk indikator IP ASN dan IPA tidak perlu dijelaskan pada TW IV namun diinput Tahunan karena periode pengambilan data pada indikator tersebut adalah Tahunan</p>	<p>1. Pengukuran Nilai IKPA DIPA 01 dan DIPA 03 tahunan belum tepat, tidak perlu dirata-ratakan karena nilai yang tertera pada OMSPAN adalah nilai akhir s.d. Desember 2025</p> <p>2. Agar dapat menambahkan tangkap layar nilai pada aplikasi OMSPAN ataupun ESADEWA untuk nilai IKPA, NKPA dan IPA serta tangkap layar SIKEP untuk nilai IPASN</p> <p>3. Pada indikator kinerja persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana Tingkat banding, Kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada para pihak agar dapat menambahkan kolom tanggal Salinan putusan dikirimkan</p> <p>4. Data kinerja untuk indikator persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu) dapat lebih informatif dengan menampilkan data perkara pidana yang dilimpahkan secara e-berpadu dan yang tidak</p> <p>5. Untuk data kinerja indikator persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan agar lebih informatif dengan menampilkan tanggal putusan diunggah pada direktori putusan</p>
9	PN Idi	√	<p>1.Pada indikator persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu untuk nilai realisasi yang dilampirkan pada notulen Monev berbeda dengan nilai realisasi dan capaian pada SIMASKU;</p> <p>2.Pada indikator Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan target yang dilampirkan pada notulen Monev berbeda dengan SIMASKU;</p> <p>3.Untuk indikator IP ASN, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai IPA seharusnya tidak disampaikan pada monev Triwulan IV karena nilai indikator tersebut untuk tahunan;</p>	<p>1.. Dasar Hukum belum memuat Penetapan IKU Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029;</p> <p>2. Belum adanya tabel rekomendasi tindaklanjut;</p> <p>3. Pada indikator Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi terdapat 3 perkara mediasi dinyatakan tidak berhasil tidak sesuai dengan jumlah perkara yang ada pada LHTL.</p> <p>4. Untuk indikator IP ASN, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai IPA seharusnya tidak disampaikan pada monev Triwulan IV karena nilai indikator tersebut untuk tahunan;</p>	<p>1.Judul tabel LHTL TW IV namun tabel hasil pengukuran kinerja TW III dan pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi TW III, sedangkan informasi yang seharusnya disampaikan TW IV;</p> <p>2.Pada BA Capalan Kinerja terdapat indikator persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu ada 1 perkara yang diselesaikan tidak tepat waktu namun pada tabel Monev Renaksi tidak dijelaskan kendalanya.</p> <p>3.Pada indicator persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi terdapat 2 perkara mediasi namun yang berhasil mediasi hanya 1 perkara tetapi pada BA Capalan Kinerja terdapat 3 perkara mediasi, tidak sinkron.</p>	<p>1.Pada tabel uraian permasalahan dan tindaklanjut tidak menjelaskan ada atau tidak adanya kendala.</p> <p>2.Pada BA Capalan Kinerja terdapat indikator persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu ada 1 perkara yang diselesaikan tidak tepat waktu namun pada tabel Monev Renaksi tidak dijelaskan kendalanya.</p> <p>3.Pada indicator persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi terdapat 2 perkara mediasi namun yang berhasil mediasi hanya 1 perkara tetapi pada BA Capalan Kinerja terdapat 3 perkara mediasi, tidak sinkron.</p>	<p>1.File excel yang dilampirkan belum sesuai dengan perhitungan capaian kinerja berdasarkan IKU Terbaru.</p> <p>2.Perkara restoratif pada table yang dilampirkan tidak ada perkara yang masuk, tidak ada sisa, namun terdapat 1 perkara yang putus.</p>
10	PN Kuala Simpang	√	<p>Pada indikator persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama, jumlah perkara yang putus berbeda dengan file excel data perkara</p>	<p>1. Pada indikator persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama, jumlah perkara yang putus berbeda dengan file excel data perkara</p> <p>2. Untuk indikator IP ASN, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai IPA seharusnya tidak disampaikan pada monev Triwulan IV karena nilai indikator tersebut untuk tahunan;</p>	√	<p>Untuk indikator IP ASN, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai IPA seharusnya tidak disampaikan pada monev Triwulan IV karena nilai indikator tersebut untuk tahunan;</p>	<p>1. Agar data perkara yang ditampilkan pada putusan yang tepat waktu lebih informatif dengan menampilkan tanggal pendaftaran, tanggal putus, tanggal minutasi dan lama proses perkara;</p> <p>2. Agar pada data dukung untuk indikator Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) lebih informatif dengan menampilkan data perkara pidana yang e-Berpadu dan yang tidak;</p> <p>3. Masih terdapat data dukung untuk indikator yang tidak menampilkan perhitungan pencapaian kinerja secara pertriwulan</p> <p>4. Untuk data dukung nilai IP ASN, IKPA, NKPA dan IPA bisa menampilkan screen shoot dari aplikasi</p>

11	PN Blangkejeren	✓	<p>1. Indikator persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat pertama kepada para pihak, jumlah data perkara yang diputus adalah 21 perkara sedangkan pada indikator persentase perkara yang diputus tepat waktu ada 22 perkara yang putus;</p> <p>2. Indikator Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana Tingkat banding, Kasasi, dan PK tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada para pihak, alasan tidak tercapai dikarenakan tidak ada perkara pidana Tingkat banding, kasasi , dan PK yang diputus pada triwulan IV, tidak sinkron dengan indikator persentase pemberitahuan petikan/amar putusan Tingkat banding Kasasi, dan PK tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada para pihak dimana terdapat 1 perkara yang disampaikan pemberitahuan petikan putusannya kepada pihak;</p>	<p>Berita Acara Capaian kinerja TW IV sudah ada namun terdapat beberapa catatan yang sama seperti catatan pada notulen rapat monev Triwulan IV. Untuk indikator IP ASN, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai IPA seharusnya tidak disampaikan pada monev Triwulan IV karena nilai indikator tersebut untuk tahunan;</p>	<p>Laporan hasil tindaklanjut Triwulan sebelumnya sudah ada namun terdapat informasi yang tidak sesuai yaitu pada jadwal tindak lanjut, seharusnya tindak lanjut dari rekomendasi monev Triwulan III dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu triwulan IV;</p>	<p>Monev Renaksi Triwulan IV Tahun 2025 sudah diupload namun tidak dapat dibaca</p>	<p>1. Indikator Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana Tingkat banding, Kasasi, dan PK tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada para pihak untuk triwulan IV dengan nilai 0, tidak sinkron dengan indikator persentase pemberitahuan petikan/amar putusan Tingkat banding Kasasi, dan PK tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada para pihak dimana terdapat 1 perkara yang disampaikan pemberitahuan petikan putusannya kepada pihak pada triwulan IV;</p> <p>2. Agar pada data kinerja untuk indikator persentase penyediaan pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak bisa lebih informatif dengan menampilkan lebih detil data perkara yang konvensional, elektronik dan surat ;</p> <p>3. Agar pada data kinerja untuk indikator persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan Tingkat banding, Kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada para pihak bisa lebih informatif dengan menampilkan lebih detil data perkara yang konvensional, elektronik dan surat ;</p> <p>4. Agar pada data kinerja indikator persentase pengiriman salinan putusan perkara tingkat banding, Kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada para pihak bisa lebih informatif dengan menampilkan lebih detil data perkara yang konvensional, elektronik dan surat;</p> <p>5. Agar pada data kinerja untuk indikator persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu) dapat lebih informatif dalam menampilkan data perkara pidana yang dilimpahkan secara e-berpadu dan yang tidak;</p> <p>6. Agar pada data kinerja untuk indikator persentase perkara perdata pertama yang menggunakan e-court dapat lebih informatif dalam menampilkan data perkara perdata yang menggunakan e-court dan yang tidak;</p> <p>7. Agar pada data kinerja untuk indikator persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-berpadu) dapat lebih informatif dalam menampilkan data perkara pidana yang diajukan secara e-berpadu dan yang tidak</p> <p>8. Belum ada data dukung untuk indikator IP ASN, Nilai IKPA DIPA 01 dan DIPA 03, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 dan DIPA 03 serta nilai IPA Satker</p>

12	PN Kutacane	✓	<p>1. Notulen rapat TW 4 sudah ada, namun keberhasilan/ kegagalan setiap indikator tidak dijelaskan secara detail dan rekomendasi atas kegagalan yang tidak tercapai tidak dijelaskan;</p> <p>2. Adanya perbedaan nilai capaian persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi antara Aplikasi SiMASKU dan Notulen Rapat;</p>	<p>1. Pada BA masih terdapat Monev Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025;</p> <p>2. Pada BA, setiap indikator kinerja tidak menjelaskan keberhasilan dan kegagalan serta rekomendasi atas kegagalan tidak dijelaskan;</p> <p>3. Agar memperhatikan periode pengambilan data sesuai dengan IKU. Untuk beberapa indikator sumber data adalah laporan tahunan sehingga seharusnya realisasi dan capaian tidak dihitung pada TW IV;</p>	<p>1. Laporan hasil tidak lanjut TW 3 tahun 2025 belum dilampirkan;</p> <p>2. Terdapat perbedaan capaian kinerja pada indikator persentase yang berhasil diselesaikan melalui mediasi antara Notulen Rapat, BA dan Aplikasi SiMASKU;</p>	<p>1. Pada monev dijelaskan terdapat 2 perkara yang wajib dan berhasil mediasi akan tetapi pada data dukung excel tidak dijelaskan sehingga kebenarannya perhitungan realisasi dan capaiannya diragukan;</p> <p>1. Pengukuran nilai realisasi pada setiap triwulan pada indikator belum tepat, pengukuran yang digunakan adalah pengukuran sampai dengan triwulan seharusnya pengukuran yang digunakan adalah pengukuran nilai realisasi setiap triwulan</p> <p>2. Nilai IKPA dan Nilai Perencanaan Anggaran pada excel tidak ada data;</p> <p>3. Jika jumlah perkara yang wajib mediasi ada 2 perkara dan yang berhasil mediasi ada 2 perkara pada TW 4, maka perhitungan realisasi dan capaian pada TW 4 dan Tahunan diragukan perhitungannya;</p> <p>4. Pada indikator persentase penyelesaian perkara pidana dan perdata yang diselesaikan tepat waktu agar lebih informatif dengan menambahkan kolom nomor perkara dan tanggal putus;</p> <p>5. Pada indikator persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan Tingkat banding, Kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada para pihak agar lebih informatif dengan menambahkan kolom nomor perkara, tanggal petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK diterima oleh Pengadilan Pengaju;</p> <p>6. Pada indikator persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan agar lebih informatif dengan menambahkan kolom nomor perkara dan tanggal unggah pada direktori putusan;</p> <p>7. Pada indikator persentase penyelesaian perkara melalui mediasi agar lebih informatif dengan menambahkan nomor perkara yang wajib mediasi dan tanggal mediasi jika mediasi berhasil;</p> <p>8. Pada indikator persentase perkara anak yang diselesaikan diversi agar lebih informatif dengan menambahkan data perkaranya;</p> <p>9. Pada persentase perkara perdata tingkat pertama (e-court) dan persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu) agar lebih informatif dapat menambahkan nomor perkaranya;</p>
13	PN Meulaboh	✓	<p>1. Notulen rapat TW 4 sudah ada, namun keberhasilan/ kegagalan setiap indikator tidak dijelaskan secara detail dan rekomendasi atas kegagalan yang tidak tercapai tidak dijelaskan;</p> <p>2. Persentase perkara yang berhasil melalui mediasi realisasi antara notulen rapat dengan realisasi aplikasi SiMASKU berbeda;</p>	<p>1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu terdapat 1 perkara yang tidak dapat diselesaikan tepat waktu namun kegagalan tidak tercapai tersebut tidak dijelaskan;</p> <p>2. Pada indikator perkara yang berhasil melalui mediasi, nilai realisasi antara BA dan Notulen Rapat berbeda;</p>	<p>1. Laporan hasil tidak lanjut TW III sudah ada, namun tidak dilengkapi dengan data dukung;</p>	<p>1. Monev rencana aksi persentase perkara yang berhasil mediasi jumlah perkara yang ditampilkan berbeda dengan jumlah perkara pada data dukung dan nilai realisasinya berbeda dengan Notulen Rapat;</p> <p>1. Pada indikator persentase penyelesaian perkara yang berhasil melalui mediasi, terdapat 6 perkara yang wajib mediasi dan hanya 1 perkara yang berhasil mediasi, seharusnya nilai realisasinya itu 16,67% sesuai dengan yang tertulis pada Notulen Rapat;</p> <p>2. Pada indikator persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan Tingkat banding, Kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada para pihak agar lebih informatif dengan menambahkan kolom nomor perkara, tanggal petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK diterima oleh Pengadilan Pengaju;</p> <p>3. Pada indikator Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak agar lebih informatif dengan menambahkan kolom nomor perkara, tanggal salinan putusan banding, kasasi, dan PK diterima para pihak</p>

14	PN Calang	√	<p>1. Terdapat perbedaan nilai realisasi dan capaian indikator Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi putusan perdamaian, RJ dan Diversi pada notulen monev dan excell data kinerja (realisasi dan capaian nilainya 0 %) sedangkan pada pengisian data capaian kinerja pada aplikasi Simasku (realisasi dan capaian N/A), jika memang tidak ada permohonan seharusnya nilainya N/A;</p> <p>2. Agar pemparahan nilai kinerja setiap indikatornya bisa didukung oleh data yang akurat pada file excell kinerjanya;</p> <p>3. Nilai IKPA DIPA 01 dan DIPA 03 diragukan karena berdasarkan data excell data kinerja, nilai yang diinput adalah nilai rata2 seharusnya nilai yang diinput ada nilai sampai dengan bulan terakhir di triwulan IV yaitu bulan Desember;</p> <p>4. Pada notulen belum disampaikan analisa ketidakberhasilan untuk indikator yang tidak tercapai dan rekomendasi kedepannya;</p>	<p>Berita Acara Capaian kinerja TW IV sudah ada namun terdapat beberapa catatan yang sama seperti catatan pada notulen rapat monev Triwulan IV. Untuk indikator IP ASN, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai IPA seharusnya tidak disampaikan pada monev Triwulan IV karena nilai indikator tersebut untuk tahunan;</p>	<p>Laporan hasil tindaklanjut sudah diupload namun tidak terbaca</p>	<p>1. Masih terdapat nilai realisasi dan capaian yang ditampilkan tidak sesuai dengan data dukung yang ditampilkan;</p> <p>2. Masih terdapat nilai realisasi dan capaian yang diragukan seperti pada indikator Nilai IKPA;</p> <p>3. Belum sepenuhnya menjelaskan secara detil analisa permasalah dan tindak lanjut kedepan untuk indikator yang tidak mencapai target</p>	<p>1. Pada data dukung kinerja indikator persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan Tingkat banding, Kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada para pihak agar lebih informatif dengan menambahkan kolom tanggal petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK diterima oleh Penagadilan Pengaju;</p> <p>2. Pada data dukung kinerja indikator persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan agar lebih informatif dengan menampilkan tanggal putusan diunggah pada direktori putusan</p> <p>3. Agar pada data kinerja untuk indikator persentase perkara perdata pertama yang menggunakan e-court dapat lebih informatif dalam menampilkan data perkara perdata yang menggunakan e-court dan yang tidak;</p> <p>4. Agar pada data kinerja untuk indikator persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu) dapat lebih informatif dalam menampilkan data perkara pidana yang dilimpahkan secara e-berpadu dan yang tidak;</p> <p>5. Agar pada data kinerja untuk indikator persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-berpadu) dapat lebih informatif dalam menampilkan data perkara pidana yang diajukan secara e-berpadu dan yang tidak;</p> <p>6. Pengambilan Nilai IKPA DIPA 01 dan DIPA 03 seharusnya nilai yang diinput adalah nilai sampai dengan bulan terakhir di periode triwulan bukan rata2, contoh untuk Triwulan IV adalah nilai bulan Desember</p>
15	PN Sinabang	√	√	<p>BA Capaian kinerja sudah ada , namun untuk indikator IP ASN dan IP ASN tidak perlu dijelaskan pada TW IV karena periode pengambilan data pada indikator tersebut adalah Tahunan</p>	√	<p>Monev Renaksi Triwulan IV Tahun 2025 sudah ada namun , namun untuk indikator IP ASN, NKPA dan IPA tidak perlu dijelaskan pada TW IV karena periode pengambilan data pada indikator tersebut adalah Tahunan</p>	<p>1. Masih terdapat nilai realasi dan capaian yang berbeda di file excell dengan yang ditampilkan pada laporan seperti pada indikator Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi;</p> <p>2. Agar pada data kinerja untuk indikator persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu) dapat lebih informatif dalam menampilkan data perkara pidana yang dilimpahkan secara e-berpadu dan yang tidak;</p>
16	PN Tapaktuan	√	<p>1.Tabel perkara yang dilampirkan pada notulen Monev tidak sinkron dengan data yang ada pada excell;</p> <p>2.Belum adanya tabel rekomendasi tindaklanjut;</p> <p>3.Untuk indikator IP ASN, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai IPA seharusnya tidak disampaikan pada monev Triwulan IV karena nilai indikator tersebut untuk tahunan.</p>	<p>1.Tidak menginformasikan berapa jumlah perkara dan putus;</p> <p>2.Belum adanya tabel rekomendasi tindaklanjut;</p> <p>3.Untuk indikator IP ASN, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai IPA seharusnya tidak disampaikan pada monev Triwulan IV karena nilai indikator tersebut untuk tahunan.</p>	<p>1.Pada indicator Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan nilai capaian yang dilampirkan tidak sesuai dengan nilai pada BA Capaian Kinerja dan SIMASKU.</p> <p>2.Untuk indikator IP ASN, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai IPA seharusnya tidak disampaikan pada monev Triwulan IV karena nilai indikator tersebut untuk tahunan.</p>	<p>Belum adanya Monev Rencana Aksi, file yang dilampirkan BA Capaian Kinerja</p>	<p>Persentase pengiriman Salinan putusan belum sesuai dengan berdasarkan IKU Terbaru</p>

17	PN Singkil	√	<p>1. Pada indikator Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan Tingkat Banding, Kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada para pihak terdapat perbedaan untuk jumlah data perkara antara yang ditampilkan di notulen dengan file excel;</p> <p>2. Pengambilan Nilai IKPA DIPA 01 dan DIPA 03 belum tepat seharusnya nilai yang diinput ada nilai sampai dengan bulan terakhir di periode triwulan bukan rata2, contoh untuk Triwulan IV maka nilai IKPA yang diambil adalah nilai IKPA sampai akhir bulan Desember;</p>	<p>- Tabel data perkara yang masuk dan putus selama triwulan IV tidak sinkron dengan data dukung pada file excel dan pada notulen;</p> <p>- Realisasi untuk indikator IP ASN dan IP ASN tidak perlu diinput pada TW IV namun diinput Tahunan karena periode pengambilan data pada indikator tersebut adalah Tahunan;</p>	Laporan hasil tindaklanjut Triwulan sebelumnya sudah ada	<p>1. Pengambilan Nilai IKPA DIPA 01 dan DIPA 03 belum tepat seharusnya nilai yang diinput ada nilai sampai dengan bulan terakhir di periode triwulan bukan rata2, contoh untuk Triwulan IV maka nilai IKPA yang diambil adalah nilai IKPA sampai akhir bulan Desember;</p> <p>2. Indikator IP ASN dan IP ASN tidak perlu dijelaskan pada TW IV namun diinput Tahunan karena periode pengambilan data pada indikator tersebut adalah Tahunan</p>	<p>1. Pada data dukung kinerja indikator persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana Tingkat banding, Kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada para pihak agar lebih informatif dengan menambahkan kolom tanggal Salinan putusan dikirimkan;</p> <p>2. Pada data dukung kinerja indikator persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan agar lebih informatif dengan menampilkan tanggal putusan diunggah pada direktori putusan;</p> <p>3. Data dukung untuk indikator persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan RJ kurang informatif agar dapat membuat tanggal perkara diselesaikan;</p> <p>4. Agar pada data kinerja untuk indikator persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu) dapat lebih informatif dalam menampilkan data perkara pidana yang dilimpahkan secara e-berpadu dan yang tidak;</p> <p>5. Pengambilan Nilai IKPA DIPA 01 dan DIPA 03 belum tepat seharusnya nilai yang diinput ada nilai sampai dengan bulan terakhir di periode triwulan bukan rata2, contoh untuk Triwulan IV maka nilai IKPA yang diambil adalah nilai IKPA sampai akhir bulan Desember;</p> <p>5. Untuk data dukung nilai IP ASN, IKPA, NKPA dan IPA bisa menampilkan screen shoot dari aplikasi</p>
18	PN Jantho	√	<p>1.Pada indicator persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak nilai realisasi yang dilampirkan pada notulen Monev berbeda dengan nilai realisasi dan capaian pada SIMASKU;</p> <p>2.Pada indicator Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi nilai realisasi yang dilampirkan pada notulen Monev berbeda dengan nilai realisasi dan capaian pada SIMASKU;</p> <p>3.Untuk indikator IP ASN, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai IPA seharusnya tidak disampaikan pada monev Triwulan IV karena nilai indikator tersebut untuk tahunan;</p>	<p>1.Belum adanya tabel rekomendasi tindaklanjut;</p> <p>2.Tidak menginformasikan berapa jumlah perkara dan putus.</p> <p>3.Untuk indikator IP ASN, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai IPA seharusnya tidak disampaikan pada monev Triwulan IV karena nilai indikator tersebut untuk tahunan;</p>	<p>1.Untuk indikator IP ASN, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai IPA seharusnya tidak disampaikan pada monev Triwulan IV karena nilai indikator tersebut untuk tahunan;</p>	<p>1.Pada indicator Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi nilai realisasi yang dilampirkan pada Monev berbeda dengan nilai realisasi dan capaian pada SIMASKU;</p> <p>2.Monev Renaksi belum seluruhnya melampirkan uraian rencana aksi untuk seluruh indicator.</p> <p>3.Untuk indikator IP ASN, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai IPA seharusnya tidak disampaikan pada monev Triwulan IV karena nilai indikator tersebut untuk tahunan;</p>	<p>Persentase pengiriman Salinan putusan pada tabel perbandingan dengan jangka menengah masih kosong.</p>

19	PN Simpang Tiga Redelong		<p>1. Notulen Rapat sudah ada tetapi capaian kinerja yang dievaluasi adalah Capaian Kinerja TW IV Tahun 2026 bukan Capaian Kinerja TW IV Tahun 2025;</p> <p>2. Notulen rapat TW 4 sudah ada, namun keberhasilan/ kegagalan setiap indikator tidak dijelaskan secara detail dan rekomendasi atas kegagalan yang tidak tercapai tidak dijelaskan;</p> <p>3. Pada indikator persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi, nilai realisasi dan capaian antara Notulen Rapat dengan nilai pada Aplikasi SiMASKU berbeda;</p> <p>4. Pada indikator persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi, nilai realisasi dan capaian antara Notulen Rapat dengan nilai pada Aplikasi SiMASKU berbeda;</p> <p>5. Nilai capaian pada indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan yang dicantumkan pada Notulen Rapat dan Aplikasi SiMASKU berbeda;</p>	<p>1. Pada BA, seluruh indikator kinerja belum menjelaskan keberhasilan dan kegagalan;</p> <p>2. Agar memperhatikan periode pengambilan data sesuai dengan IKU. Untuk beberapa indikator sumber data adalah laporan tahunan sehingga seharusnya realisasi dan capaian tidak dihitung pada TW IV;</p>	<p>1. Laporan hasil tidak lanjut TW 3 tahun 2025 belum dilampirkan;</p> <p>2. Laporan Hasil Tindak Lanjut yang disampaikan tidak menganalisa permasalahan, rekomendasi dan tindaklanjut per indikator</p>	<p>1. Monev Rencana Aksi yang disampaikan tidak sesuai dengan format Surat SEKMA Nomor 1282/SEK/SK/VII/2023;</p>	<p>1. File excel yang dilampirkan adalah data tahun 2024;</p> <p>2. Data pada excel belum mengakomodir IKU terbaru;</p>
20	PN Blangpidie	✓	<p>1. Dasar hukum pada notulen rapat menggunakan SK Penetapan IKU Pengadilan Tinggi Banda Aceh, harusnya berdasarkan IKU satuan kerja;</p> <p>2. Terdapat 2 notulen yang membahas 2 Sasaran strategis yang berbeda, namun diakuan pada jam dan hari yang sama sehingga tidak bisa dipastikan bahwa indikator yang dibahas pada rapat capaian kinerja adalah indikator terbaru sesuai dengan</p> <p>Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 27101 /SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 - 2029</p>	<p>Pada BA, belum seluruh indikator kinerja menjelaskan keberhasilan dan kegagalan;</p>	<p>Laporan hasil tindaklanjut yang dilampirkan tahun 2024</p>	<p>1. Agar monev renaksi dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan keadaan yang dihadapi oleh PN (misal, apakah memang ada SDM yang tidak bisa menghitung sisa perkara di PN Blangpidie?)</p> <p>2. Tindak lanjut tidak menjawab permasalahan yang duraikan;</p> <p>3. Belum semua indikator dimonev renanca aksinya.</p>	<p>File excel yang dilampirkan belum mengakomodir seluruh perhitungan capaian kinerja berdasarkan IKU terbaru</p>

21	PN Meureudu	√	<p>1. Pada indikator Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan Tingkat Banding, Kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada para pihak dan persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana Tingkat Banding, Kasasi, dan PK tepat waktu oleh Pengadilan Negeri Pengaju terdapat perbedaan untuk jumlah data perkara antara yang ditampilkan di notulen dengan file excell;</p> <p>2. Pada indikator Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi terdapat perbedaan untuk jumlah data perkara antara yang ditampilkan di notulen dengan file excell;</p> <p>3. Pada indikator Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara e-Berpadu dan dan yang diajukan secara e-Berpadu i terdapat perbedaan untuk jumlah data perkara antara yang ditampilkan di notulen dengan file excell;</p> <p>4. Tidak ada data dukung untuk memastikan nilai IKPA DIPA 01 dan DIPA 03</p>	<p>BA Capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2025 sudah ada, namun data kinerja input/output yang ditampilkan tidak sinkron dengan data dukung pada file excel dan pada notulen</p>	<p>Laporan hasil tindaklanjut Triwulan sebelumnya sudah ada, namun untuk indikator IP ASN dan IP ASN tidak perlu dijelaskan pada TW IV tetapi diinput Tahunan karena periode pengambilan data pada indikator tersebut adalah Tahunan</p>	<p>Monev rencana Aksi sudah Ada, namun untuk indikator IP ASN dan IP ASN tidak perlu dijelaskan pada TW IV tetapi diinput Tahunan karena periode pengambilan data pada indikator tersebut adalah Tahunan</p>	<p>1. Pada data dukung kinerja indikator persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana Tingkat banding, Kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada para pihak agar lebih informatif dengan menambahkan kolom tanggal Salinan putusan dikirimkan dan hanya menampilkan data yang digunakan yaitu perkara pidana saja;</p> <p>2. Pada data dukung kinerja indikator persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan agar lebih informatif dengan menampilkan tanggal putusan diunggah pada direktori putusan;</p> <p>3. Data dukung untuk indikator persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan RJ kurang informatif agar dapat membuat tanggal perkara diselesaikan;</p> <p>4. Untuk data dukung nilai IP ASN, IKPA, NKPA dan IPA bisa menampilkan screen shoot dari aplikasi</p> <p>5. Agar pada data kinerja untuk indikator persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu) dapat lebih informatif dalam menampilkan data perkara pidana yang dilimpahkan secara e-berpadu dan yang tidak;</p>
22	PN Suka Makmue	√	<p>Notulen rapat monev TW 4 sudah ada namun berdasarkan notulen tersebut dalam rapat monev tidak ada menjelaskan secara detil mengenai analisa keberhasilan/ kegagalan serta rekomendasi untuk target kinerja indikator yang tidak tercapai.</p>	<p>1. Pada indikator 1 tidak menjelaskan berapa jumlah perkara perdata dan pidana. hanya ada keseluruhan sebanyak 46 perkara;</p> <p>2. Pada indikator persentase penyelehan/ pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak hanya menjelaskan berapa salinan putusan yang dikirim. Tidak menjelaskan berapa salinan putusan yang tersedia dan belum menjelaskan berapa putusan yang dikirimkan secara konvensional, melalui surat, atau elektronik;</p> <p>3. Tidak menjelaskan mengapa perkara yang diputus sebanyak 46 perkara, namun yang diupload pada direktori putusan hanya 34 putusan;</p> <p>4. Terdapat indikator Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata yang tidak ada realisasi, namun ada sebab keberhasilan;</p> <p>5. Pada persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi terdapat target 20% dan realisasi 25%, namun dituliskan pada tabel capaian 500% dan pada narasi capaian 5000%. Mohon periksa kembali perhitungannya;</p> <p>6. Sebab kegagalan mediasi masih menuliskan berdasarkan teori dan bukan sebab kegagalan yang dihadapi di satuan kerja;</p>	<p>1. Terdapat perbedaan capaian kinerja antara BA Capaian kinerja dan laporan tindaklanjut;</p> <p>2. Tidak ada rekomendasi yang mumpuni untuk pencapaian kinerja ke depan. Semua hanya berisi Untuk tetap berpedoman pada SOP kecuali pada Indikator Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan</p>	<p>1. Monev Rencana Aksi Triwulan IV sudah ada namun belum ada penjelasan uraian permasalahan dan rekomendasi detil untuk rencana aksi kedepan pada indikator yang tidak tercapai;</p> <p>2. Terdapat rencana aksi yang berada di luar kewenangan satuan kerja. Contoh satuan kerja berencana Melakukan Optimalisasi pada aplikasi SIPP supaya ada fitur pengingat sehingga keterlambatan pengiriman salinan putusan dapat dicegah;</p> <p>3. Realisasi berbeda dengan yang dicantumkan pada BA Monev Capaian Kinerja</p>	<p>1. Perhitungan capaian kinerja pada data excel yang ditampilkan belum mengakomodir IKU baru</p> <p>2. untuk nilai IKPA tahunan, tidak dibagi 4. Ambil nilai Desember di aplikasi OMSPAN atau Myintress</p>

- | | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | <p>7. Pada persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi, tidak ada perkara yang masuk namun ada sebab kegagalan dan keberhasilan;</p> <p>8. pada sebab keberhasilan Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan masih berupa rencana aksi, bukan program/kegiatan yang telah dijalankan.</p> | | |
|--|--|--|--|--|

Mengetahui,
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh



A BONDAN

Banda Aceh, 12 Februari 2026
Kepala Sub Bagian Rencana Program Dan Anggaran

RELIA NOVITA RAHIM